



Pemerintah Kota Balikpapan

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN



TAHUN
2025-2029



[0212]7682



Jl. Jend Sudirman, Balikpapan



dprd.balikpapan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan YME atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029 sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan hingga 5 (lima) tahun mendatang yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa Tim Penyusun dan seluruh pemangku kepentingan telah memberikan upaya, saran dan masukan yang maksimal terhadap proses penyusunan Renstra ini, sehingga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan menyumbangkan waktu dan pikirannya, dan semoga dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi utama dalam memfasilitasi DPRD Kota Balikpapan serta memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Kota Balikpapan. Kedepannya Sekretariat DPRD akan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan target yang telah ditentukan, sehingga akan membutuhkan saran dan masukan yang membangun,

Demikian laporan ini disusun, semoga memberi manfaat dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN	8
2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ..	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.....	26
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Pendanaan	35
4.2 Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah	76
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	79
BAB V PENUTUP	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1. 2 Konsep Penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	14
Tabel 2. 2	Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.....	15
Tabel 2. 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	17
Tabel 2. 4	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	23
Tabel 2. 5	Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.....	24
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.....	29
Tabel 3. 2	Penetapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	32
Tabel 3. 3	Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.....	33
Tabel 4. 2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan	56
Tabel 4. 3	Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting. Formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dituangkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Keberadaan perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan dari Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembangunan Daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah harus mengacu sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan. Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut.

```
graph TD
    subgraph RPJMD [RPJMD]
        A[PENYUSUNAN RANWAL RPJMD] --> B[Rancangan RPJMD]
        B --> C[Musrenbang RPJMD]
        C --> D[Ranc. Akhir RPJMD]
        D --> E[PERDA RPJMD]
    end

    subgraph Renstra_PD [RENSTRA PD]
        F[SEKDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD] --> G[VERIFI-KASI]
        G --> H[Penyesuaian Rancangan Renstra-PD]
        H --> I[Rancangan Akhir Renstra PD]
        I --> J[VERIFI-KASI]
        J --> K[Penetapan Renstra PD]
        K --> L[Renstra PD]
    end

    A --> F
    B --> G
    C --> G
    D --> J
    E --> J

    F -- "Program prioritas, outcome, & pagu" --> G
    F -- "Permasalahan & strategi PD" --> H
    G -- "Kegiatan prioritas, output, & pagu" --> H
    G -- "sesuai" --> B
    G -- "Tidak sesuai" --> H
    H --> B
    I --> B
    J -- "sesuai" --> D
    J -- "Tdk sesuai" --> K
```

Gambar 1. 2
Konsep Penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD



2

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2030 serta memperhatikan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern agar selalu melakukan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan. Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2025-2030 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2021-2026.

Selanjutnya rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disahkan dengan keputusan Walikota sehingga menjadi Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tersebut, Sekretaris DPRD Kota Balikpapan menetapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rancangan Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra Sekretariat DPRD ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan disusun untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Renstra yang tersusun akan selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus di wujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
23. **Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;**

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029 dimaksudkan untuk:

Sebagai salah satu Dokumen Perencanaan yang menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan;
2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 adalah:
 - a. Sebagai acuan dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
 - b. Mengoptimalkan Fasilitas Sekretariat DPRD terhadap Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Kota Balikpapan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub bab ini merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Sub bab ini mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sub bab ini menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan IKK.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sub bab ini mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD. Serta identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Pada sub bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Yang disajikan dalam tabel yang berisi tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja selama 5 (lima) tahun.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sub bab ini memuat informasi yang berisi strategi rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan. Serta menyajikan informasi mengenai rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pendanaan

Pada sub bab ini memuat informasi mengenai daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

4.2. Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah

Pada sub bab ini menjelaskan subkegiatan yang mendukung urusan program prioritas kepala daerah.

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada sub bab ini menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, yang membawahkan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sekretariat dewan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sekretaris DPRD, melaksanakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mempersiapkan kegiatan persidangan, rapat dan risalah serta peninjauan DPRD;
- 2) penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian umum Setwan, merumuskan dan mengkaji, peraturan perundang-undangan pemerintahan dan Pemerintah Daerah serta kehumasan;
- 3) pengkoordinasian dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan Daerah serta memfasilitasi delegasi masyarakat dan tamu DPRD; dan
- 4) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagian Umum

Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memmmberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Umum melaksanakan fungsi:

- 1) menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- 2) mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 3) mengelola layanan administrasi DPRD;
- 4) mengelola layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
- 5) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga rumah jabatan DPRD;
- 6) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Sekretariat DPRD dan gedung DPRD;
- 7) menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD dan DPRD; dan

- 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum membawahi subbagian tata usaha dan kepegawaian yang mempunyai urusan tugas:

- 1) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 2) melaksanakan kearsipan;
- 3) menyusun administrasi kepegawaian;
- 4) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 5) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- 6) menyiapkan bahan administrasi keuangan dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- 7) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; dan
- 8) pelaksanaan uraian tugas lainnya yang diberikan Bagian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. **Bagian Program dan Keuangan**

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- 1) menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 2) mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 3) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;(catatan: hanya verifikasi usulan dari bagian umum)
- 4) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; (catatan: hanya verifikasi usulan dari bagian umum)
- 5) menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 6) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 7) mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

- 8) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- 9) mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 10) mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 11) mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- 12) menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- 13) melaksanakan survey kepuasan internal Sekretariat DPRD; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi:

- 1) menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- 2) memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3) memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
- 4) memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) mengumpulkan bahan penyiapan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
- 6) memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7) menyusun risalah rapat;
- 8) mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- 9) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- 10) menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- 11) menyelenggarakan publikasi DPRD;
- 12) menyelenggarakan keprotokolan DPRD;
- 13) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas DPRD;
- 14) melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi pimpinan DPRD;

- 15) melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan semester dan kinerja DPRD;
- 16) melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana kerja dan agenda kerja DPRD dalam Badan Musyawarah (Banmus);
- 17) memfasilitasi pelaksanaan agenda kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
- 18) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan panitia khusus (pansus);
- 19) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- 20) mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD; dan
- 21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi:

- 1) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUPA PPAS perubahan;
- 2) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBD perubahan;
- 3) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- 5) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 6) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 7) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat;
- 8) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi rancangan peraturan daerah;

- 9) memfasilitasi, mengoordinasikan, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 10) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- 11) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 12) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan dukungan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 13) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 14) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- 15) memfasilitasi pelaksanaan agenda kerja Badan Anggaran dan Badan Kehormatan; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Tipologi A yang berpedoman pada Permendagri 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota digambarkan pada bagian berikut ini.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan



Sumber: Permendagri 104 Tahun 2016

2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Sumber daya pada Perangkat Daerah merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan penting untuk mendukung kinerja dan

keberhasilan birokrasi. Peningkatan kualitas SDM, efisiensi pengelolaan anggaran, penggunaan teknologi secara efektif, dan pengelolaan sumber daya material yang baik merupakan kunci untuk mencapai birokrasi yang efisien, efektif, dan berintegritas.

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memiliki data personil ASN dan Pegawai Non ASN sebanyak orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berdasarkan Status Pegawai		
	1) PNS	24	
	2) PPPK	33	
	3) Tenaga Bantu	7	
2	Berdasarkan Jenis Kelamin		
	1) PNS		
	- Pria	14	
	- Wanita	10	
	2) PPPK		
	- Pria	17	
	- Wanita	16	
	3) Tenaga Bantu		
	- Pria	2	
	- Wanita	5	
3	Berdasarkan Status Pendidikan		
	1) S2	5	
	2) S1	26	
	3) DIPLOMA	3	
	4) SLTA/SEDERAJAT	27	
	5) SMP/SEDERAJAT	3	
	6) SD	0	
4	Berdasarkan Golongan		
	1) PNS		
	- Golongan I	0	
	- Golongan II	6	
	- Golongan III	15	
	- Golongan IV	3	
	2) PPPK		

NO	PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Golongan IX - Golongan VII - Golongan V	11 1 21	
5	Berdasarkan Jabatan Struktural 1) Eselon II 2) Eselon III 3) Eselon IV	1 3 1	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, tabung portable, inventaris barang, dan lain-lain. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar jenis, jumlah, dan kondisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebelum reviu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	SEDANG	RUSAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Stacion Wagon /Kijang Inova	Unit	1	0	0	1
2	Rak Penyimpanan	Unit	1	0	0	1
3	Lemari Penyimpanan	Unit	3	6	0	9
4	Lemari Besi/metal	Unit	2	0	0	2
5	Lemari Kayu	Unit	2	0	0	2
6	LCD Projector/Infocus	Unit	4	0	0	4
7	Papan Tulis	Unit	1	0	0	1
8	Meja Kerja Kayu	Unit	9	0	0	9
9	Meja Rapat	Unit	3	0	0	3
10	Meja Resepcionis	Unit	1	0	0	1
11	Meja Tambahan	Unit	1	0	0	1
12	Meja Bundar	Unit	6	0	0	6
13	Meja Setengah Biro	Unit	1	0	0	1
14	Kasur /Spring Bed	Unit	6	0	0	6
15	Meja Makan Besi	Unit	1	0	0	1
16	Meja makan Kayu	Unit	5	0	0	5
17	Kursi rapat	Unit	1	0	0	1
18	Kursi tamu	Unit	1	0	0	1
19	Kursi Biasa	Unit	2	0	0	2
20	Rak Sepatu	Unit	1	0	0	1

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	SEDANG	RUSAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Sofa	Unit	15	0	0	15
22	Jam Mekanis	Unit	9	0	0	9
23	Mesin Penghisap Debu / Vacum Cleaner	Unit	4	0	0	4
24	Lemari Es	Unit	7	0	0	7
25	A.C. Split	Unit	29	0	2	31
26	Kitchen Set	Unit	1	0	0	1
27	Amplifier	Unit	1	0	0	1
28	Sound System	Unit	6	0	0	6
29	Tangga Aluminium	Unit	1	0	0	1
30	Karpet	Unit	1	0	0	1
31	Gordyin/Kray	Unit	1	0	0	1
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	3	0	0	3
33	Meja Tamu Biasa	Unit	10	0	0	10
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	14	0	0	14
35	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Unit	22	0	0	22
36	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	Unit	1	0	0	1
37	Rak Peralatan	Unit	1	0	0	1
38	TV Monitor	Unit	8	0	1	9
39	Bendera Merah Putih	Buah	2	0	0	2
40	Kamera Digital	Unit	3	0	0	3
41	P.C Unit	Unit	22	0	0	22
42	Lap Top	Unit	19	0	1	20
43	Tablet PC	Unit	42	0	4	46
44	Keyboard (Peralatan Mini Komputer	Unit	38	0	8	46
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	32	0	0	32
46	Mesin Absensi	Unit	2	0	0	2
47	Mitsubishi Pajero Sport Dakar	Unit	4	0	0	4
48	Vidio Monitor	Unit	6	0	0	6
49	Kursi Lipat	Unit	149	0	0	149
50	Treadmill	Unit	1	0	0	1
51	Dispenser	Unit	6	0	0	6
52	Coffee Maker	Unit	11	0	0	11
53	Voice Recorder	Unit	6	0	0	6
54	Handy Talky (HT)	Unit	18	0	0	18
55	Personal Komputer	Unit	4	0	0	4
56	Scanner	Unit	9	0	0	9
57	Meubeleur	Unit	3	0	0	3

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan periode sebelumnya (2021–2026). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan target kinerja. Pencapaian realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2025 sebagian besar tercapai bahkan melebihi dari target. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- (%)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)				
INDIKATOR SASARAN																
1	Cakupan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%	100%	N/A	N/A	N/A	91,25%	93,61%	N/A	N/A	N/A	91,25%	93,61%	N/A	N/A	N/A
2	Cakupan Layanan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	87,60%	N/A	N/A	N/A	100%	87,60%	N/A	N/A	N/A
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	B	B	N/A	N/A	N/A	CC	B	B	BB	BB	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	27	28	29	N/A	N/A	27,01	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- (%)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)				
5	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	N/A	N/A	70	72	74	N/A	N/A	65,85	72,79	74,51	N/A	N/A	94%	101%	101%
6	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	N/A	N/A	N/A	64,86	72,82	63,09	64,59	64,86	72,82	74,77	N/A	N/A	N/A	112%	103%
INDIKATOR PROGRAM																
1	IKM Internal Perangkat Daerah	N/A	N/A	70	72	74	N/A	N/A	65,85	85,47	86,97	N/A	N/A	94%	119%	118%
2	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	N/A	N/A	70	72	74	N/A	N/A	72,1	83	100	N/A	N/A	103%	115%	135%

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, penentuan kelompok sasaran merupakan elemen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan layanan yang dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran. Penetapan kelompok sasaran ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kota Balikpapan. Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kelompok sasaran yang dimaksud meliputi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari dukungan administrasi dan operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

2.1.4.1. Pimpinan dan Anggota DPRD

Sebagai pemangku kepentingan utama, pimpinan dan anggota DPRD menjadi kelompok sasaran prioritas dalam pelaksanaan program Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dukungan diarahkan pada penyediaan layanan administrasi, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta pemenuhan kebutuhan informasi, data, dan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kerja legislatif.

2.1.4.2. Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD seperti komisi, badan anggaran, dan badan kehormatan memerlukan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berperan dalam menyediakan fasilitasi pelaksanaan rapat kerja, dokumentasi hasil pembahasan, penyediaan bahan pendukung, pengelolaan agenda kegiatan, dan hal-hal lain yang mendukung kinerja alat kelengkapan DPRD Kota Balikpapan.

2.1.4.3. Masyarakat

Sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sekretariat DPRD turut berperan dalam memfasilitasi proses penyerapan aspirasi, termasuk dalam kegiatan audiensi, reses, konsultasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi kelompok sasaran tidak langsung dari pelayanan Sekretariat DPRD.

2.1.4.4. Pemerintah Daerah (Eksekutif)

Sebagai mitra kerja DPRD dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pemerintah daerah menjadi kelompok sasaran strategis. Sehingga, hubungan kerja antara DPRD

dan pemerintah daerah memerlukan koordinasi yang intensif. Sekretariat DPRD menjembatani berbagai proses administratif dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pemerintah daerah menjadi mitra sekaligus kelompok sasaran yang dilibatkan dalam penyusunan agenda bersama, pembahasan RAPBD, pembahasan peraturan daerah, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah.

2.1.4.5. Media Massa dan Pemangku Kepentingan Lain

Dalam rangka mendorong transparansi dan partisipasi publik, media massa serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian dari kelompok sasaran Sekretariat DPRD. Penyediaan informasi resmi, publikasi kegiatan, dan akses terhadap dokumen publik merupakan bagian dari strategi komunikasi Sekretariat untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga DPRD.

2.1.5. Mitra Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Sekretariat DPRD menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan berbagai pihak. Mitra kerja ini berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Peran mitra kerja Sekretariat DPRD yaitu:

1. Mempercepat arus informasi dan koordinasi lintas sektor;
2. Memastikan sinkronisasi agenda DPRD dengan eksekutif;
3. Mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi;
4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan DPRD;
5. Mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD.

Mitra kerja Sekretariat DPRD dapat berasal dari berbagai unsur yang terdiri dari Internal Pemerintah Daerah dan Eksternal Perangkat Daerah yaitu:

1. Mitra Kerja Internal Pemerintah Daerah
 - Pimpinan dan Anggota DPRD – sebagai penerima layanan utama Sekretariat DPRD.
 - Perangkat Daerah – khususnya Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Protokol, dan OPD teknis lainnya dalam rangka fasilitasi pembahasan kebijakan, program, dan anggaran.
 - Sekretariat Daerah – dalam penyelarasan agenda kerja dan administrasi pemerintahan.
2. Mitra Kerja Eksternal Pemerintah
 - Pemerintah Pusat – Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga teknis terkait untuk koordinasi kebijakan dan sinkronisasi program.

- Pemerintah Provinsi – khususnya Biro Pemerintahan dan Biro Hukum untuk fasilitasi pembinaan, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pemerintah Daerah Lain – sebagai mitra pertukaran informasi, studi banding, dan kerja sama antar daerah.

3. Mitra Kerja Non-Pemerintah

- Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan partisipasi publik.
- Media Massa – sebagai mitra publikasi kegiatan DPRD dan penyebarluasan informasi publik.
- Akademisi dan Tenaga Ahli – untuk memberikan masukan berbasis kajian ilmiah dan naskah akademik.
- Dunia Usaha – sebagai mitra dalam pembahasan regulasi yang berkaitan dengan investasi dan perekonomian daerah.
- Tokoh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lokal – sebagai sumber aspirasi dan mitra dialog kebijakan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bermitra, sejajar dan harmonis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat dan mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang menjadi permasalahan utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yakni **Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang teridentifikasi antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

- Beban pekerjaan yang tidak merata antar Bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Akar permasalahan utama hal ini disebabkan karena struktur organisasi Sekretariat DPRD belum sesuai dengan Permendagri no. 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta PP Nomor 72 tahun

2019 tentang Perubahan atas PP no. 18 Tahun 2016. Dalam hal ini seharusnya SOTK Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sudah menjadi tipe-A untuk mawadahi beban kerja yang besar sehingga terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Sehingga beban pekerjaan dapat terbagi rata antar bagian yang akan menunjang kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih baik.

- Keterbatasan sumber daya aparatur pendukung Sekretariat DPRD baik dari segi kuantitas dan kualitas. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan terkait moratorium pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan yang berasal dari tingkat pusat ini, secara langsung menghambat penambahan jumlah pegawai berstatus ASN, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendukung kesekretariatan.
- Belum memadainya sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sarana dan prasarana yang berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum tersedia secara memadai, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kondisi, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional lembaga dalam menjalankan peran fasilitasi DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana prasarana berbasis digital, belum terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses kerja kedewanan, serta rendahnya tingkat literasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD yang berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan aplikasi dan data elektronik.
- Kinerja pelayanan yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi akibat kurangnya standar atau pedoman tata laksana layanan terhadap fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Hal tersebut terjadi karena belum adanya kebijakan kelembagaan yang secara komprehensif mengatur alur, standar mutu, dan indikator kinerja layanan kedewanan, serta masih rendahnya kesadaran organisasi terhadap pentingnya standardisasi prosedur sebagai dasar peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Selain itu kualitas perencanaan pada Sekretariat DPRD juga dinilai belum maksimal karena dipengaruhi dengan berbagai dinamika politik dalam memfasilitasi DPRD seperti minimnya komitmen terhadap jadwal dan rencana kerja DPRD yang sudah ditetapkan dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD juga mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan.

Tabel berikut merangkum pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD yang menjadi dasar perencanaan strategis ini.

Tabel 2. 4
Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

MASALAH POKOK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH/ AKAR MASALAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD	Beban pekerjaan yang tidak merata antar bagian	Struktur organisasi yang belum sesuai dengan Permendagri no. 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP no. 18 Tahun 2016
	Keterbatasan sumber daya aparatur	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendukung Sekretariat DPRD karena keterbatasan formasi penerimaan ASN
	Belum memadainya sarana dan prasarana	Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
		Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mendukung fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
	Kinerja pelayanan belum optimal	Belum tersedianya standar atau pedoman tata laksana layanan terhadap fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
		Kualitas perencanaan belum maksimal
		Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
		Minimnya komitmen terhadap jadwal dan rencana kerja DPRD yang sudah ditetapkan
		Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah informasi, kejadian, fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh untuk dicarikan pemecahannya.

Berdasarkan pemetaan masalah dan akar masalah, beberapa isu strategis utama telah diidentifikasi yang memerlukan perhatian khusus dalam rencana strategis ini. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan tantangan internal Perangkat Daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam renstra ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Maka dapat diidentifikasi yang mempengaruhi isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Seluruh Anggota DPRD Kota Balikpapan sudah memahami tugas dan fungsi sebagai DPRD	Struktur organisasi yang belum sesuai dengan Permendagri no. 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP no. 18 Tahun 2016	Tata Kelola di Indonesia Masih Relatif Lemah	Reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	Reformasi Birokrasi Berkelanjutan	Keterpaduan dan Sinkronisasi Agenda Kerja DPRD dengan Eksekutif yang Belum Optimal	Penguatan pelayanan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan
Dinamika politik yang cenderung stabil di Kota Balikpapan	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendukung Sekretariat DPRD karena keterbatasan formasi penerimaan ASN					
	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD					
	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mendukung fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD					
	Belum tersedianya standar atau pedoman tata laksana layanan terhadap fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kualitas perencanaan belum maksimal					
	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi					
	Minimnya komitmen terhadap jadwal dan rencana kerja DPRD yang sudah ditetapkan					
	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD					

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Jika dikaitkan dengan permasalahan pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi isu Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah: “Penguatan pelayanan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan”.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tahun 2025–2029, Dinas Perdagangan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola perdagangan yang sehat, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih yaitu **“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”**. Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadaban tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Dalam kallimat visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

1. Kota Global

Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Nyaman untuk Semua

Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

3. Madinatul Iman

Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip sebagai berikut:

- Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat
- Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan
- Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota
- Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah
- Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan

Untuk memastikan tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Perangkat Daerah berperan dalam mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengoptimalkan program serta kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsinya. Hal itu dapat didukung melalui tujuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Tujuan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang diperbarui pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019, Sekretariat DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang khusus menelaah kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyebutkan bahwa faktor utama yang menghambat kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam kuantitas maupun kualitas serta kurangnya koordinasi dan konsolidasi (Noor & Rande, 2025). Selain itu beberapa kajian atau penelitian juga menyebut bahwa kerangka kerja sekretariat (administrasi, rapat, tenaga ahli, kunjungan tamu) sering belum memiliki standar pelayanan baku (Afandi, 2024). Beberapa penelitian tersebut sejalan dengan permasalahan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang telah dijelaskan pada di Bab sebelumnya.

Kota Balikpapan dengan luas wilayah 503,3 km yang terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan memiliki 45 anggota DPRD sebagai perwakilan dari masing-masing dapil dituntut agar lebih ebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena

itu, Sekretariat DPRD dituntut agar selalu meningkatkan kualitas dukungan dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD secara konsisten

Sehingga, dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2029, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu “**Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas**” maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu “**Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**”. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Selanjutnya pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond*, dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SASARAN RPJMD: Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks kepuasan DPRD	Mengukur indeks kepuasan fasilitasi DPRD	Nilai survey kepuasan fasilitasi DPRD	74,51	74,86	75,17	75,50	75,83	76,16	76,5	Mengacu pada Permendagri No. 14 tahun 2017 ttg pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik
		Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang efektif dan efisien	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi sesuai dengan standar	Pengukuran yang mengkompilasi berbagai aspek dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, seperti pembahasan raperda, pengesahan dokumen penganggaran, dan peran pengawasan DPRD	Komposit = 40% fasilitasi dukungan fungsi legislasi DPRD + 30% fasilitasi dukungan fungsi penganggaran DPRD + 30% fasilitasi dukungan fungsi pengawasan DPRD	71,84%	74,04%	75,48%	78,21%	79,17%	81,49%	82,69%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat	74,77	74,95	75,25	75,55	75,95	76,45	77,00	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang,
2. Didasarkan pada capaian kinerja pembangunan,
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan
4. Terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Adapun penahanan rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Penahapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan aspek kelembagaan Sekretariat DPRD dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Akselerasi pengkoordinasian lintas Sektoral dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Pemantapan sarana dan prasarana penunjang urusan Sekretariat DPRD dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Kesinambungan Aspek kelembagaan, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta pengkoordinasian lintas sektoral dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

3.2.2. Arah Kebijakan

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan hadir karena adanya lembaga DPRD Kota Balikpapan. Sehingga berbagai langkah kebijakan dan strategi yang diambil harus selaras dengan DPRD Kota Balikpapan. Hal tersebut menjadi penting karena kebijakan dan strategi yang diambil oleh pimpinan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan harus mendukung kinerja DPRD Kota Balikpapan. Selain itu penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 3
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kota	Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan dan Birokrasi	1) Modernisasi layanan kesekretariatan berbasis teknologi informasi. 2) Penataan sistem arsip dan dokumentasi secara terstandar dan terintegrasi. 3) Penguatan budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. 4) Peningkatan koordinasi internal antarbagian untuk mendukung kelancaran tugas DPRD	
2	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kota		1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan DPRD. 2) Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang konsisten di bidang keuangan. 3) Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan DPRD.	
3	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota		1) Penguatan manajemen agenda rapat yang terencana dan responsif terhadap dinamika politik daerah 2) Pengembangan sistem informasi penjadwalan dan notulensi rapat digital. 3) Penguatan fungsi fasilitasi rapat dengan sarana prasarana yang modern dan ramah teknologi 4) Peningkatan kualitas pelayanan protokoler yang profesional dan responsif	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD		1) Penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPRD dengan kompetensi yang relevan dan mumpuni 2) Optimalisasi peran tenaga ahli dalam analisis kebijakan dan penyusunan produk hukum 3) Peningkatan kolaborasi antara tenaga ahli, sekretariat, dan alat kelengkapan DPRD	
5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi		1) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (result-based monitoring). 2) Implementasi manajemen risiko untuk mengantisipasi hambatan pelaksanaan program dan kegiatan 3) Evaluasi berkala terhadap pencapaian target Renstra 4) Penyusunan laporan kinerja yang lebih informatif, analitis, dan berbasis data	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

BAB IV

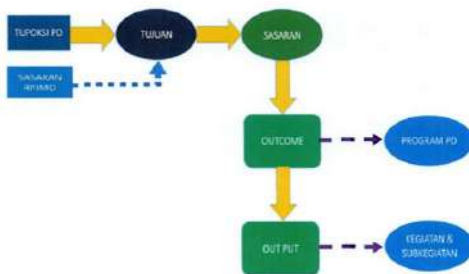
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Pendanaan

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan yang berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang harus ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Program, kegiatan, sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output dan telah mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri beserta pemukhtahirannya. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan pada renstra 2025-2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Sekretariat DPRD yaitu pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD pada tiap tahunnya hingga tahun 2030.



Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Neger Nomor 2 Tahun 2025

Adapun pada Renstra 2025-2029 ini, terdapat 2 (dua) program yang mendukung pencapaian target, sasaran dan strategi Sekretariat DPRD yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Rumusan Program, Kegiatan serta Subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 secara rinci tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD				Indeks Kepuasan DPRD (Indeks)		
		Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang efektif dan efisien			Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terasilitasi Sesuai dengan Standar (%)		
			Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan		Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran Secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya Indikator Kinerja Yang Relevan, Terukur dan Selaras Dari Tingkat Individu Hingga Organisasi	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Secara Berkala dan Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana Perkantoran Secara Efektif dan Efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Spesifikasi dan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Fungsional Melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
					Laporan Administratif Keuangan DPRD Serta Fasilitas Kesejahteraan Yang Transparan, Akuntabel, dan Tepat Waktu	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Dukungan Administrasi dan Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Untuk Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Pendanaan dalam proses perencanaan Rencana Strategis (Renstra) memegang peranan krusial karena menentukan sejauh mana program dan kegiatan strategis dapat direalisasikan secara efektif. Pada tahap ini, alokasi sumber daya keuangan harus disesuaikan dengan visi, misi, serta tujuan jangka menengah Pemerintah Kota Balikpapan. Proses pendanaan dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi kebutuhan pendanaan setiap program kegiatan serta sub kegiatan, pemetaan sumber pembiayaan (baik dari APBN/APBD, hibah, maupun sumber lainnya), dan penyusunan kerangka pendanaan yang realistis dan berkelanjutan. Pendanaan yang tepat dalam Renstra bukan hanya mencerminkan kemampuan fiskal, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, integrasi antara perencanaan strategis dan penganggaran menjadi kunci dalam memastikan efektivitas implementasi Renstra secara menyeluruh.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				140.319.469.000		144.529.053.000		151.755.506.000		154.790.616.000		159.434.334.000		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				75.077.906.190		79.001.000.000		82.830.506.000		86.805.000.000		91.084.334.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	86,97	87,5	75.077.906.190	88	79.001.000.000	88,5	82.830.506.000	89	86.805.000.000	89,5	91.084.334.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59.998.740		68.000.000		70.000.000		70.000.000		72.000.000		
Tersedianya Indikator Kinerja Yang Relevan, Terukur dan Selaras Dari Tingkat Individu Hingga Organisasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	59.998.740	5	68.000.000	5	70.000.000	6	70.000.000	5	72.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0		5		5		5		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		51.000.000		52.500.000		52.500.000		54.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0	5	51.000.000	5	52.500.000	5	52.500.000	6	54.000.000		
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				14.999.685		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				14.999.685		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				14.999.685		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				14.999.685		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		17.000.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0	5	17.000.000	5	17.500.000	6	17.500.000	5	18.000.000			
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.500.000.000		8.925.000.000		9.805.506.000		10.050.000.000		10.332.334.000			
Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Secara Berkala dan Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	66	8.500.000.000	938	8.925.000.000	980	9.805.506.000	1.008	10.050.000.000	1.022	10.332.334.000			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.500.000.000		8.925.000.000		9.805.506.000		10.050.000.000		10.332.334.000			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	66	8.500.000.000	938	8.925.000.000	980	9.805.506.000	1.008	10.050.000.000	1.022	10.332.334.000			
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.364.016.150		1.883.000.000		2.555.000.000		2.675.000.000		2.555.000.000			
Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	31	56	1.364.016.150	3	1.883.000.000	3	2.555.000.000	3	2.675.000.000	3	2.555.000.000			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0				154				196			196	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	3				1				1			2	
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				193.922.000		70.000.000		80.000.000		200.000.000		80.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	3	193.922.000	1	70.000.000	1	80.000.000	2	200.000.000	1	80.000.000		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.170.094.150		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	31	56	1.170.094.150	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		1.763.000.000		2.425.000.000		2.425.000.000		2.425.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	154	1.763.000.000	196	2.425.000.000	196	2.425.000.000	196	2.425.000.000		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.906.309.600		8.825.000.000		8.825.000.000		7.825.000.000		8.225.000.000		
Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana Perkantoran Secara Efektif dan Efisien	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	7.906.309.600	3	8.825.000.000	3	8.825.000.000	3	7.825.000.000	3	8.225.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3				8				6			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13	4				13				8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	57				57				89			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	295	370				400				400			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	4		6		6		4		6			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.306.309.600		1.350.000.000		1.250.000.000		900.000.000		900.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3	1.306.309.600	8	1.350.000.000	8	1.250.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000		
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.100.000.000		1.100.000.000		900.000.000		650.000.000		650.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13	4	1.100.000.000	13	1.100.000.000	10	900.000.000	8	650.000.000	8	650.000.000		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.400.000.000		1.750.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	4	1.500.000.000	6	1.750.000.000	6	1.750.000.000	4	1.400.000.000	6	1.750.000.000		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		200.000.000		200.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	250.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	295	370	3.000.000.000	400	3.500.000.000	400	3.500.000.000	400	3.500.000.000	400	3.500.000.000		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		500.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	57	500.000.000	57	500.000.000	89	800.000.000	89	800.000.000	89	800.000.000		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				780.000.000		900.000.000		1.300.000.000		2.150.000.000		900.000.000		
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Spesifikasi dan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	780.000.000	0	900.000.000	1	1.300.000.000	4	2.150.000.000	0	900.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4		4		4		4					
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		400.000.000		1.250.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	400.000.000	4	1.250.000.000	0	0		
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				780.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	780.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.500.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		
Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	65	8.500.000.000	65	6.100.000.000	65	6.100.000.000	65	6.100.000.000	65	6.100.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	36				36				36			36
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	18				24				24			24
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	36	1.500.000.000	36	1.750.000.000	36	1.750.000.000	36	1.750.000.000	36	1.750.000.000		
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	18	250.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	65	6.750.000.000	65	3.750.000.000	65	3.750.000.000	65	3.750.000.000	65	3.750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.900.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		
Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Fungsional Melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	33	1.900.000.000	33	2.050.000.000	33	2.050.000.000	33	2.050.000.000	33	2.050.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2				2				2			
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.400.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	33	1.400.000.000	33	1.300.000.000	33	1.300.000.000	33	1.300.000.000	33	1.300.000.000		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	500.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				39.167.581.700		45.025.000.000		46.825.000.000		47.050.000.000		47.450.000.000		
Laporan Administratif Keuangan DPRD Serta Fasilitasi Kesejahteraan Yang Transparan, Akuntabel, dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	39.167.581.700	6	45.025.000.000	6	46.825.000.000	8	47.050.000.000	6	47.450.000.000		
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45				45				45			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	36	45		45		45		45		45						
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				38.135.000.000		43.500.000.000		45.175.000.000		45.175.000.000		45.675.000.000					
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45	38.135.000.000	45	43.500.000.000	45	45.175.000.000	45	45.175.000.000	45	45.675.000.000					
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				854.460.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.500.000.000					
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	854.460.000	6	1.300.000.000	6	1.400.000.000	8	1.600.000.000	6	1.500.000.000					
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				178.121.700		225.000.000		250.000.000		275.000.000		275.000.000					
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	36	45	178.121.700	45	225.000.000	45	250.000.000	45	275.000.000	45	275.000.000					
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				6.900.000.000		5.225.000.000		5.300.000.000		8.835.000.000		13.400.000.000					
Terselenggaranya Dukungan Administrasi dan Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Untuk Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	7	6	6.900.000.000	6	5.225.000.000	6	5.300.000.000	6	8.835.000.000	6	13.400.000.000					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	200	60				140				140			200		200	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	19	8				7				7			7		14	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	10	6				6				6			6		6	
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				100.000.000		275.000.000		300.000.000		310.000.000		350.000.000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	10	6	100.000.000	6	275.000.000	6	300.000.000	6	310.000.000	6	350.000.000		
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD				300.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	7	6	300.000.000	6	300.000.000	6	350.000.000	6	375.000.000	6	300.000.000		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				500.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		4.750.000.000		4.750.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	200	60	500.000.000	140	1.250.000.000	140	1.250.000.000	200	4.750.000.000	200	4.750.000.000		
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				6.000.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		8.000.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	19	8	6.000.000.000	7	3.400.000.000	7	3.400.000.000	7	3.400.000.000	14	8.000.000.000		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				65.241.562.810		65.528.053.000		68.925.000.000		67.985.616.000		68.350.000.000		
Meningkatnya Dukungan Fasilitas Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Pembahasan Raperda sesuai Standar (%)	54,55	58,33	65.241.562.810	62,5	65.528.053.000	64	68.925.000.000	68	67.985.616.000	69,23	68.350.000.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD	
	Persentase Fasilitas Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu (%)	100	100				100		100					
	Persentase Fasilitas Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar (%)	48,72	73,81				77,38		78,57		80,95			83,33
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				8.750.000.000		11.450.000.000		12.875.000.000		11.700.000.000		11.400.000.000		
Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1	8.750.000.000	1	11.450.000.000	1	12.875.000.000	1	11.700.000.000	1	11.400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	36	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	5		5		5		9		9			
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	5	10		10		10		6		6			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	5	50.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.100.000.000		3.000.000.000		3.850.000.000		3.200.000.000		3.100.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	36	40	2.100.000.000	40	3.000.000.000	40	3.850.000.000	40	3.200.000.000	40	3.100.000.000		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				5.100.000.000		5.150.000.000		5.200.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	5	10	5.100.000.000	10	5.150.000.000	10	5.200.000.000	6	4.500.000.000	6	4.500.000.000		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				1.500.000.000		2.500.000.000		3.025.000.000		3.200.000.000		3.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	5	1.500.000.000	5	2.500.000.000	5	3.025.000.000	9	3.200.000.000	9	3.000.000.000		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1	0	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				4.417.042.800		4.700.000.000		4.880.000.000		5.110.000.000		5.150.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran Secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	4.417.042.800	1	4.700.000.000	1	4.880.000.000	1	5.110.000.000	1	5.150.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				515.000.000		800.000.000		850.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	515.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	880.000.000	1	900.000.000		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1.050.000.000		1.050.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1	1.080.000.000	1	1.080.000.000	1	1.100.000.000		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				1.202.042.800		1.200.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	1.202.042.800	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000		
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				200.000.000		200.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				19.460.000.000		19.550.000.000		20.070.000.000		20.315.616.000		20.270.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	40	19.460.000.000	40	19.550.000.000	40	20.070.000.000	40	20.315.616.000	40	20.270.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1				1				1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	19	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	25	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	29	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2	5		5		5		5		5			
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4.800.000.000		4.850.000.000		4.900.000.000		4.950.000.000		4.950.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	19	40	4.800.000.000	40	4.850.000.000	40	4.900.000.000	40	4.950.000.000	40	4.950.000.000		
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4.400.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	40	4.400.000.000	40	4.500.000.000	40	4.600.000.000	40	4.650.000.000	40	4.650.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4.330.000.000		4.400.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	25	40	4.330.000.000	40	4.400.000.000	40	4.500.000.000	40	4.600.000.000	40	4.600.000.000		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4.400.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	29	40	4.400.000.000	40	4.500.000.000	40	4.600.000.000	40	4.650.000.000	40	4.650.000.000		
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				50.000.000		100.000.000		220.000.000		165.616.000		120.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2	5	50.000.000	5	100.000.000	5	220.000.000	5	165.616.000	5	120.000.000		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				880.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	880.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				11.010.975.810		12.250.000.000		12.370.000.000		12.330.000.000		12.600.000.000		
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	11.010.975.810	6	12.250.000.000	6	12.370.000.000	6	12.330.000.000	6	12.600.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	45	270		270		270		225		270			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	45	1		1		1		45		1			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	35	4.600		3.800		3.900		3.950		4.100			
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	5	7		9		9		9		9			
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				100.000.000		100.000.000		150.000.000		700.000.000		100.000.000		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	45	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	45	700.000.000	1	100.000.000		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				3.100.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000		3.900.000.000		4.650.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	45	270	3.100.000.000	270	4.600.000.000	270	4.600.000.000	225	3.900.000.000	270	4.650.000.000		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				187.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	5	7	187.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				324.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	324.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				265.000.000		350.000.000		370.000.000		380.000.000		400.000.000		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0	4	265.000.000	4	350.000.000	4	370.000.000	4	380.000.000	4	400.000.000		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				100.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6.934.975.810		6.100.000.000		6.150.000.000		6.250.000.000		6.350.000.000		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	35	4.600	6.934.975.810	3.800	6.100.000.000	3.900	6.150.000.000	3.950	6.250.000.000	4.100	6.350.000.000		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				10.250.000.000		8.108.053.000		8.920.000.000		8.430.000.000		9.000.000.000		
Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	10.250.000.000	3	8.108.053.000	3	8.920.000.000	2	8.430.000.000	3	9.000.000.000		
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	28.800		28.800		28.800		28.800					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD				500.000.000		600.000.000		620.000.000		680.000.000		700.000.000		
Tersusunnya Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2	500.000.000	2	600.000.000	2	620.000.000	2	680.000.000	2	700.000.000		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				4.750.000.000		3.008.053.000		3.500.000.000		2.950.000.000		3.500.000.000		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	4.750.000.000	3	3.008.053.000	3	3.500.000.000	2	2.950.000.000	3	3.500.000.000		
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				5.000.000.000		4.500.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	28.800	5.000.000.000	28.800	4.500.000.000	28.800	4.800.000.000	28.800	4.800.000.000	28.800	4.800.000.000		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				750.050.165		750.000.000		790.000.000		950.000.000		980.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1	1	750.050.165	1	750.000.000	1	790.000.000	1	950.000.000	1	980.000.000		
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1				1		1		1			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				100.050.165		200.000.000		220.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1	100.050.165	1	200.000.000	1	220.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				650.000.000		550.000.000		570.000.000		350.000.000		330.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1	1	650.000.000	1	550.000.000	1	570.000.000	1	350.000.000	1	330.000.000		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				697.957.200		620.000.000		650.000.000		650.000.000		655.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	2	1	697.957.200	1	620.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	655.000.000			
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	2	2				2				2				
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				300.000.000		260.000.000		270.000.000		270.000.000		275.000.000			
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	2	1	300.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	275.000.000			
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				397.957.200		360.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000			
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	2	2	397.957.200	2	360.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000			
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				9.905.536.835		8.100.000.000		8.370.000.000		8.500.000.000		8.295.000.000			
Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	10	16	9.905.536.835	16	8.100.000.000	16	8.370.000.000	16	8.500.000.000	16	8.295.000.000			
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	12				12				12				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3	5				5				5				
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				542.961.750		450.000.000		450.000.000		450.000.000		250.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	1	542.961.750	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	250.000.000		
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				5.300.000.200		5.500.000.000		5.700.000.000		5.800.000.000		5.800.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	10	16	5.300.000.200	16	5.500.000.000	16	5.700.000.000	16	5.800.000.000	16	5.800.000.000		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.900.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	12	2.900.000.000	12	750.000.000	12	770.000.000	12	790.000.000	12	800.000.000		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1.162.574.885		1.400.000.000		1.450.000.000		1.460.000.000		1.445.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3	5	1.162.574.885	5	1.400.000.000	5	1.450.000.000	5	1.460.000.000	5	1.445.000.000		

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

4.2 Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah

Program prioritas kepala daerah adalah program-program utama yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk dilaksanakan dalam masa jabatannya, bertujuan untuk mengatasi isu strategis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program prioritas merupakan bentuk konkret dari janji politik dan arah kebijakan pembangunan selama masa jabatan kepala daerah tersebut. Program-program ini biasanya berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan Masyarakat Adapun 9 Program Prioritas Kepala Daerah Periode 2025-2030 yaitu:

1. Transformasi Birokrasi
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Mengatasi Stunting
4. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata
5. Pengendalian Banjir
6. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman
7. Balikpapan Kota MICE dan Wisata
8. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
9. Balikpapan Kota Ramah Anak

Dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai unsur Penunjang Urusan Pemerintahan mendukung program prioritas pertama Kepala Daerah yaitu Transformasi Birokrasi. Sub kegiatan yang mendukung program prioritas adalah serangkaian aktivitas yang lebih spesifik dan terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan utama atau program yang telah ditetapkan. Sub Kegiatan ini saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Adapun subkegiatan Sekretariat DPRD yang mendukung program Prioritas Perangkat Daerah tersebut dijabarkan pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4. 3
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD				
1.	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Dukungan Fasilitas Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
			4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
			4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
			4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
			4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester	
			4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
			4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
			4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
			4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
			4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
			4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
			4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
			4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
			4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
			4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
			4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.02.2.08.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat DPRD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. IKU ditetapkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Balikpapan, Sekretariat DPRD berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
2.	Indeks Kepuasan DPRD	Poin	74,51	74,84	75,17	75,5	75,83	76,16	76,5	
3.	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Sesuai dengan Standar	%	71,84	74,04	75,48	78,21	79,17	81,49	82,69	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,77	74,95	75,25	75,55	75,95	76,45	77	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Sedangkan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang dipakai untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada level unit kerja atau bidang tertentu yang mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD											
1.	Indeks Kepuasan DPRD	positif	Poin	74,51	74,84	75,17	75,5	75,83	76,16	76,5	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	74,77	74,95	75,25	75,55	75,95	76,45	77	
3.	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Sesuai dengan Standar	positif	%	71,84	74,04	75,48	78,21	79,17	81,49	82,69	
4.	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar	positif	%	54,55	56,52	58,33	62,5	64	68	69,23	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	86,97	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
6.	Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar	positif	%	48,72	71,43	73,81	77,38	78,57	80,95	83,33	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan tercapai apabila dijalankan dengan tanggungjawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat melalui reformasi birokrasi.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Demikian Renstra ini kami susun, semoga dapat menjadi acuan kinerja Sekretariat DPRD sehingga visi misi Kota Balikpapan dapat tercapai dengan baik dan juga mencapai target sasaran kinerja yang diharapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sendiri pada khususnya.

